

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Tindak **Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Pekerja Migran Indonesia di** Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia didalam menjalankan peran BP3MI mengalami hambatan dalam menghadapi TPPO terhadap pekerja migran Indonesia. Perspektif teoritik yang digunakan dalam studi ini adalah teori peran, pemerintah, kebijakan publik, konsep politik hukum, konsep TPPO dan konsep pekerja migran Indonesia. Perspektif ini penempatan peran BP3MI dalam penanganan TPPO sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu melalui studi Pustaka, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Temuan skripsi menemukan bahwa peran BP3MI melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan TPPO kepada masyarakat, melakukan Koordinasi, sinergitas dan kolaborasi untuk meningkatkan kerjasama dalam melakukan penanganan TPPO dengan stakeholder terkait dan melakukan Penanganan Kasus TPPO Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ketika dalam melaksanakan peran BP3MI mengalami hambatan seperti kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan BP3MI sehingga tidak meratanya informasi sampai kepada masyarakat dan kurang peduli (*aware*) pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa tentang TPPO terhadap pekerja migran Indonesia. Ketika semua instansi telah menjalankan fungsi dan tugas dalam penanganan TPPO terhadap pekerja migran Indonesia maka bisa TPPO terhadap pekerja Indonesia bisa berkurang atau bahkan tidak ada lagi.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pekerja Migran Indonesia (PMI), Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)